

MEMBURU KEBERADAAN TKW DI SURIAH

SEBUAH atensi memang tak cukup hanya berupa sebuah ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Inilah yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan masalah yang dihadapi TKW di Suriah, Dasmaskus. Di negara kawasan Timur Tengah tersebut, ternyata sepanjang tahun 2001-2006 ada 40 ribu TKW ilegal! Padahal negara tersebut tidak direkomendasikan sebagai negara tujuan pengiriman TKW.

KARENA Suriah belum ditetapkan sebagai negara tujuan penempatan TKW Indonesia untuk sektor informal ke luar negeri, maka seluruh TKW yang dikirim ke Suriah dengan sendirinya merupakan tenaga kerja ilegal sehingga berpotensi menciptakan berbagai masalah. Hal ini sesungguhnya sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai surat pemberitahuan dari Depnaker RI mengenai larangan pengiriman TKW ke Suriah.

Untuk mendalami sekaligus memburu sindikat mana saja yang selama ini terlibat dalam pengiriman TKW ke Suriah, maka Pemerintah Indonesia mengirimkan tim dari berbagai instansi terkait yakni Drs Mardjono (Depnaker), Ferry Adamhar (Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu), dan dari jajaran Polri adalah Muji Misino SE (Staf Ahli Depnaker), Kopol Drs Sri Suari M Si (Kanit V

Sat IV Renakta Ditreskrimun Polda Metro Jaya dan Kombes Pol Drs Anton Charliyan (Kanit III Ditkamtrans Bareskrim Mabes Polri).

"Selama ini kita hanya tahu para pelaku *trafficking in person* menjadikan Suriah hanya sebagai pintu gerbang bagi para TKI untuk masuk ke Timur Tengah, tapi nyatanya tidak. Mereka memang bekerja di sana," kata Anton.

Dari hasil investigasi yang dilakukan pihak kepolisian, pengiriman TKI ini dilakukan oleh sindikat baik secara perorangan maupun mengatasnamakan perusahaan. Para pelaku menggunakan modus operandi dengan memasukkan TKI ke negara yang dianggap aman sebelum akhirnya dikirim ke negara tujuan sesungguhnya.

Perjalanan tim investigasi ke Suriah ini, ujar Anton, berawal dari informasi yang diberikan KBRI

Januari silam bahwa ada seorang agen PJTKA Irak yang meminta izin KBRI untuk mengirimkan tiga orang WNI ke Irak yang akan dipekerjakan sebagai PRT. Mereka adalah Aminan binti Surokadi, Mariyam binti Suparni dan Muniah binti Karma Domin.

Permintaan izin itu dilakukan karena adanya ketentuan kantor Imigrasi Suriah bahwa seluruh WNI yang akan memasuki wilayah Irak disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KBRI Damaskus berdasarkan Nota Diplomatik Nomor 243/1A-I/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang isinya imbauan untuk mencegah setiap WNI yang akan memasuki Irak melalui Suriah.

"Ini tentu saja tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Dan untuk itu kita perlu menindak lanjuti kasus ini," ungkap Anton.



TKW di Suriah

Pemerintah Indonesia selama ini hanya merekomendasikan negara-negara tertentu yang dianggap secara ekonomi mampu menerima tenaga kerja Indonesia. Di antaranya, negara di kawasan Asia pasifik yakni, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Korea, Jepang dan Brunai Darussalam.

Sedangkan negara tujuan TKI yang direkomendasikan pemerintah Indonesia untuk kawasan Timur Tengah masing-masing adalah Saudi, Kuwait, Yordania, Qatar, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Suriah.

Sesungguhnya, kata Anton, Suriah adalah negara yang kurang makmur secara ekonomi sehingga hanya mampu menggaji PRT sebesar 100 US dollar sebulan, padahal di negara kawasan Timur Tengah 160 US dollar sebulan. Walaupun banyak TKI yang bertahan di sana itu lebih disebabkan karena mendapat perlakuan yang baik dan



Anton Charliyan beserta delegasi Indonesia di Suriah.

cukup bersahabat dari masyarakat setempat. "Dari hasil wawancara kita dengan para TKW, mereka bilang majikan Suriah lebih baik dan bersahabat," terang Anton.

SURIAH HANYA BUTUH PRT

Sebetulnya berdasarkan ketentuan, pemerintah Suriah belum mengizinkan adanya tenaga kerja asing di bidang informal dengan

Kasus Pemalsuan Paspor, Tindak Kriminal dan Korban Mati di Suriah

1. KBRI banyak menemukan penggunaan identitas palsu (paspor aspal) dalam pengiriman TKW ke Suriah.
2. Sementara pembuatan visa dalam proses (1 bulan) biasanya TKW yang bersangkutan malah diberangkatkan ke negara lain. Ketika visa selesai, visa diberikan kepada TKW pengganti dengan membuat paspor yang identitasnya sama dengan visa on arrival namun orangnya berbeda.
3. Dari pengamatan KBRI dan hasil wawancara dengan para TKW pemegang paspor aspal, disinyalir ada kerjasama antara agen PJTKI dengan para oknum di kantor Imigrasi Indonesia dalam pembuatan paspor aspal tersebut.
4. Dampak dari paspor aspal. Banyak TKW di Suriah yang tak memiliki izin tinggal. Sesuai ketentuan mereka akan mendapat hukuman berat namun sejauh ini belum dilakukan. Mereka hanya dideportasi dan dicekal seumur hidup.
5. Banyak terjadi pemalsuan identitas usia pemegang paspor. Seperti yang terjadi pada Trisnawati binti Sarta yang ternyata ketika diberangkatkan ke Suriah baru berusia 12 tahun.
6. Trisnawati harus masuk penjara karena dituduh melakukan pencurian uang dan perhiasan milik majikannya. Namun KBRI kesulitan melakukan pembelaan karena tersangka masih anak-anak.
7. Berkaitan dengan banyaknya TKW Indonesia di Suriah, kasus-kasus tindak kriminal seperti pencurian, prostitusi dan tindak asusila yang dilakukan TKW Indonesia juga meningkat. Untuk itulah KBRI berupaya untuk segera memulangkan para TKW untuk menghindarkan adanya hukuman dari pemerintah Suriah dan rusaknya citra bangsa Indonesia.
8. Sampai saat ini telah terjadi kasus kematian TKW Indonesia di Suriah sebanyak 21 orang. Empat di antara para jenazah telah dikembalikan kepada pihak keluarga sementara yang lainnya ataz izin keluarga telah dimakamkan di Suriah. [cil]



pertimbangan masih tingginya angka pengangguran di negara ini. Namun pada 19 Maret 2001 Menteri Dalam Negeri Suriah mengeluarkan Keputusan Nomor 234/QN yang mengatur tentang pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi pembantu rumah tangga dan pengasuh anak, baik Arab maupun orang asing. Keputusan itulah yang dijadikan pegangan PJTKI Suriah untuk mendatangkan TKW Indonesia.

Dari informasi yang diperoleh konon pemerintah Suriah segera akan membuat peraturan perundangan yang meresmikan keberadaan pengerah tenaga kerja Suriah. Jika ini terealisasi maka kegiatan penempatan TKW Indonesia dapat diakui secara resmi. KBRI saat ini sedang berupaya untuk merealisasikan adanya memorandum kesepahaman (MOU) antara pemerintah RI dengan Pemerintah Suriah.

Dengan kenyataan itu, KBRI berupaya melakukan pendekatan kepada para pimpinan instansi yang menangani permasalahan tenaga kerja seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Imigrasi, Pengadilan dan kepolisian. Kegiatan lobbying tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi kasus ketenagakerjaan yang melabatkan TKW sehingga nantinya akan mendapat perhatian dan kemudahan dalam proses penyelesaiannya.

Menurut Anton, meningkatnya angka kejahatan "trafficking in person" tersebut disebabkan sulitnya lapangan pekerjaan pasca krisis ekonomi yang berakibat pada munculnya pengangguran sehingga menimbulkan kemiskinan. Kesulitan ekonomi itulah yang mendorong mereka untuk mengabdikan nasib di luar negeri.

"Faktor lainnya adalah pengaruh



Kunjungan kerja ke Suriah.

bujuk rayu sindikat pelaku, iklan, pengaruh tetangga dan pengaruh saudara maupun keluarga," kata Kepala Unit III/Direktorat I Keamanan Ketentraman Nasional (Kanit III/Dit I Kamtramnas) ini.

KASUS-KASUS MENONJOL

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mabes Polri, kasus *trafficking in person* sejak tahun 2005 - Januari 2006 ditemukan sebanyak 30 kasus. Masing-masing 2 kasus di Polda Lampung, 6 kasus di Polda Jawa Timur, 1 kasus di Polda Maluku, 3 kasus di Polda Sulsel, 2 kasus di Polda Kepri, 4 di Polda Kalbar, 7 kasus di Polda Metro Jaya, 1 kasus di Polda Jawa Barat, 1 kasus di Polda Sulteng, 2 kasus di Polda Sulsel, 1 kasus di Polda Sumut.

Ke 30 kasus itu terdiri dari 19 kasus perdagangan wanita, 3 kasus perdagangan wanita di bawah umur, 2 kasus perdagangan bayi, 2 kasus adopsi ilegal, 1 kasus melarikan bayi untuk mengemis, 2 kasus melarikan anak perempuan tanpa

ijin, dan 1 kasus penipuan TKW.

Para pelaku tercatat 42 orang. Modus operandinya dilakukan dengan cara menjanjikan pekerjaan di restoran/toko, penipuan tenaga kerja, dan menjual diri. Sedangkan modus operandi penjualan bayi dilakukan dengan membiayai persalinan ibu hamil, menghilangkan asal-usul warga, dijerat hutang, adopsi ilegal.

Sementara korban terdiri dari 58 orang. Di antaranya, 40 orang wanita dewasa, 3 orang wanita di bawah umur, 10 orang anak di bawah umur, dan 5 orang bayi. Sedangkan status kasus masing-masing, 4 kasus sudah divonis, 1 kasus P 21, 7 kasus masih disidik dan 18 kasus dalam penyelidikan.

Kasus lainnya yang sedang ditangani Mabes Polri adalah kasus perdagangan wanita ke Jepang dengan berkedok duta seni impresariat. Tersangka kasus ini terdiri dari tiga orang dan satu di antaranya merupakan warga negara Jepang. [cil]

Pengalaman adalah guru yang paling berharga, hanya saja ia menuntut biaya yang tinggi

- Thomas Carlyle -

IMIGRASI IKUT BERMAIN

KETERLIBATAN para oknum dalam melanggengkan bisnis *trafficking in person* atau perdagangan manusia bukan isapan jempol. Imigrasi Indonesia di Malaysia ternyata ikut bermain dalam bisnis yang menggiurkan itu. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kini tengah menyelidiki hal itu.

"BELAKANGAN ini Imigrasi kita memang sedang dalam sorotan berkaitan dengan kasus perdagangan perempuan. Saya tak segari-segan menindaknya. Semua atasannya mulai dari Malaysia hingga Jepang akan saya tindak. Jangan ragukan komitmen saya," ujar Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Hamid Awaluddin di Medan, pekan lalu.

Untuk membuktikan janji itu, kata Hamid, Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM kini tengah menelusuri kasus tersebut di Malaysia, serta melakukan pengusutan kemungkinan kasus serupa juga terjadi di China.

Munculnya dugaan keterlibatan Imigrasi dalam perdagangan perempuan ini dilontarkan kepolisian berawal tertangkapnya Edi, tersangka anggota sindikat perdagangan perempuan Indonesia di Bandar Udara Polonia Medan. Edi tertangkap saat menjemput tenaga kerja wanita ilegal yang dipulangkan dari Malaysia.

Sementara itu, menurut Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Roni F Sompri kepada *Jagratara* di Jakarta, Medan merupakan jalur transit trafficking, menyusul Aceh, Kepri, Riau, Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Sulut. "Kota-kota ini adalah jalur transit. Trafficking yang dianggap paling aman

oleh para pelaku trafficking," ujar Roni seraya menambahkan pihaknya banyak menemukan kasus-kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh TKW dari Jawa.

Roni mengatakan, untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen, harus ada semacam kerjasama dan keterpaduan antara Depnaker, Pemda dan Imigrasi. "Pemalsuan KTP itu terjadi di awal ketika orang akan membuat dokumen paspor. Pemda, dalam hal ini kelurahan atau kecamatan, pada tingkat itulah pemalsuan dimulai. Masak orang Jawa bisa masuk ke Sumut, bagaimana ceritanya?" tandas Roni seraya menambahkan untuk memperkecil resiko pelanggaran seyogyanya pengiriman TKI harus berdasarkan jumlah pekerja atau *job order* negara tujuan.

Menanggapi kemungkinan keterlibatan pihak Imigrasi dalam kasus trafficking tersebut, Roni mengungkapkan, itu terlihat dari terbitnya Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi TKI ilegal yang dipulangkan. SPLP itu, katanya, diper-

oleh Edi bukan dari Imigrasi tapi melalui calo-calo yang bisa mendapatkan SPLP. Bagaimana caranya, pihaknya tidak menuding Imigrasi tapi paling tidak ada yang perlu didalami apakah ada pemalsuan, penyimpangan atau bantaun orang dalam Imigrasi.

Pihaknya, dalam hal ini kepolisian pasti mendukung penyelidikan dugaan keterlibatan Imigrasi. "Kita sama-sama tahu Imigrasi berperan dalam mencegah perdagangan perempuan Indonesia. Kalau mereka mau cermat dan teliti bisa minta bantuan kelurahan atau kecamatan untuk mengecek keaslian paspor atau SPLP. Dengan begitu perdagangan perempuan bisa dicegah," katanya.

Roni juga mengatakan bahwa Imigrasi seharusnya bisa membedakan seseorang itu ke luar negeri mau wisata atau bekerja. Kalau tak terlihat seperti wisatawan tetapi cuma punya paspor, tak punya visa kerja, Imigrasi bisa mencegah dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. ***



Penampungan TKW